

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025



**PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN TUNGKAL JAYA**

Alamat : Jln. Palembang-Jambi Km.148 Desa Peninggalan



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN TUNGKAL JAYA

Jalan Palembang Jambi KM.148 Desa Peninggalan
Kode Pos 30759 Email : tungkaljayakecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : /KPTS/TKL JAYA/2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN PEMERINTAH KECAMATAN
TUNGKAL JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT TUNGKAL JAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023,
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 serta Renstra Perangkat Daerah masing-masing;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Tungkal Jaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
15. Pengesahan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2017 tentang Renstra Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Keputusan Camat Tungkal Jaya Tentang Rencana Strategis No. 49/KPTS/TKLJAYA/2022 Pemerintah Kecamatan Tungkal jaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Pemerintah Kecamatan
Tungkal Jaya Tahun Anggaran 2025

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Tungkal Jaya

PADA TANGGAL : 25 Juni 2025



KAMAT TUNGKAL JAYA,

YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si

Pembina

NIP. 19830628 200212 1 004

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan);*
- 2. Kepala Bappeda dan PM Kab. Musi Banyuasin;*
- 3. Arsip.*



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN TUNGKAL JAYA

Jalan Palembang Jambi KM.148 Desa Peninggalan
Kode Pos 30759 Email : tungkaljayakecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : /KPTS/TKL JAYA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

CAMAT TUNGKAL JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Tungkals Jaya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah di Undangkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Tungkals Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Tungkals Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tungkals Jaya Tahun 2023
- Mengingat :
1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi ,kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi banyuasin Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten Musi banyuasin Tahun 2016 -2036;
26. Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
27. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
28. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : 050/188/TAPD/SE/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Pemetaan Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, dengan susunan panitia seluruhnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025
 2. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Camat Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Peninggalan
pada tanggal : 25 Juni 2025



YUDI SUHENDRA,S.E.,M.Si
Pembina
NIP. 19830628 200212 1 004

Tembusan Yth :

1. *Bupati Musi Banyuasin di Sekayu (sebagai laporan)*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*

Lampiran : Keputusan Camat Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 077/KPTS/TKL JAYA/2025
Tanggal : 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan
1.	Yudi Suhendra,S.E.,M.Si	Camat Tungal Jaya
2.	Pipin Arwin,S.Sos.,M.Si	Sekretaris Kecamatan Tungal Jaya
3.	Rafly Rivani ,S.I.P	Kasi Pemerintahan
4.	Gatot Sugiharto,S.E	Kasi PPD/K
5.	Endang Sriwahyuni ,SE	Kasi Kesos
6.	H.Suganda,SKM.,M.M	Kasi Pelayanan Umum
7.	Irsandi,S.K.M	Kasi Keamananan dan Ketertiban Umum
8.	Hermanto,SH	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
9.	Riduan Hadi,S.I.P	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10.	Ema Rohmawati, A.Md	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Peninggalan
Pada tanggal : 2025



YUDI SUHENDRA,S.E.M.Si
Pembina
NIP. 19830628 200212 1 004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 dan Dokumen Perencanaan Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2023 – 2026.

Substansi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tungkal Jaya pada Tahun 2025.

Tungkal Jaya, 2025

CAMAT TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19830628 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Serta Capaian Renstra Kec. Tungkal Jaya.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kec. Tungkal Jaya.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja.....	22
2.5 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KEC. TUNGKAL JAYA.....	30
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Kec. Tungkal Jaya.....	31
3.3 Program dan Kegiatan.....	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEC. TUNGKAL JAYA.....	40
BAB V PENUTUP.....	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perubahan Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan rancangan awal Renja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin, Rencana Strategis (RESNTRA) Kecamatan Tungkal Jaya 2023-2026, di dalamnya menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2025 dan rencana kerja perubahan pada tahun 2025.

Renja Perubahan Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja Tungkal Jaya Tahun Anggaran 2025, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Perubahan Renja Kecamatan Tungkal Jaya, selaras dengan Renstra Kerja Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 .1.15.5 – 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 1).
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan bagi para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025 adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2025;
2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan : (1) Latar Belakang, (2) Landasan Hukum,(3). Maksud dan Tujuan, (4). Sistematika Penulisan

2. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TUNGKAL JAYA

Bab ini menguraikan : (1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Serta Capaian Renstra Tahun 2017-2022, (2) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, (3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongpicung, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Bojongpicung, serta program dan kegiatan.

4. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TUNGKAL JAYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Serta Capaian Renstra KEC. TUNGKAL JAYA 2024

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tungkal Jaya, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Tungkal Jaya sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2025.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2023-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Tungkal Jaya 2023-2026 dapat diketahui. Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Program Anggaran Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Ke.II ,Anggaran Kecamatan Tungkal Jaya sebesar 7.616.216.746 Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.071.209.548,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 27.19%.

Secara umum pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan belum memenuhi target Rencana Kerja Operasional Triwulan II, ini dikarenakan masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan pada triwulan II Ini

Tingkat realisasi program kegiatan tahun 2025 pada Triwulan Ke – II kecamatan Tungkal Jaya dapat dilihat pada table berikut:

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN TUNGKAL JAYA TAHUN ANGGARAN 2025
S/D TRIWULAN II**

NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA	
	ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN KEUANGAN
		(Rp) (%)
1	2	3 4
Kecamatan Tungal Jaya	4. 451. 435. 056, 0 0	2. 112. 207. 165, 00 47, 45
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	4. 071. 969. 056, 0 0	1. 921. 752. 161 47, 19
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3. 459. 047, 00	2. 954. 500, 00 84, 53
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. 547. 750, 00	1. 124. 500, 00 72, 65
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	1. 947. 297, 00	1. 830. 000, 00 93, 98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. 540. 158. 162, 0 0	1. 449. 407. 036, 00 57, 06
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	2. 540. 158. 162, 0 0	1. 449. 407. 036, 00 57, 06
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34. 900. 000, 00	28. 130. 000, 00 80, 60
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14. 670. 000, 00	13. 500. 000, 00 92, 02
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	20. 230. 000, 00	14. 630. 000, 00 72, 32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	314. 469. 487, 00	217. 357. 391, 00 63, 47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	9. 925. 065, 00	3. 891. 000, 00 39, 20
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	88. 220. 927, 00	66. 680. 000, 00 75, 58
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17. 992. 545, 00	7. 775. 000, 00 43, 21
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24. 875. 678, 00	24. 783. 800, 00 99, 63
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14. 292. 272, 00	13. 216. 000, 00 92, 47
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50. 000. 000, 00	39. 730. 000, 00 79, 46
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	109. 163. 000, 00	61. 281. 591, 00 56, 14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43. 565. 960, 00	43. 030. 000, 00 98, 77
Pengadaan Mebel	43. 565. 960, 00	43. 030. 000, 00 98, 77

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.830.400,00	139.428.893,00	55,81
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	113.916.000,00	44.172.893,00	38,78
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.914.400,00	95.256.000,00	70,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.550.000,00	41.444.341,00	4,68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan ,Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.840.000,00	36.644.341,00	46,48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000,00	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000,00	4.800.000,00	71,54
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	335.226.000,00	171.590.004,00	51,19
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	333.076.000,00	171.590.004,00	51,52
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	333.076.000,00	171.590.004,00	51,52
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	2.150.000,00	0	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	2.150.000,00	0	0
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.240.000,00	18.865.000,00	42,64
Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.240.000,00	18.865.000,00	42,64
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, Dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	12.450.000,00	5.100.000,00	34,17
Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	31.700.000,00	7.200.000,00	48,24

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TUNGKAL JAYA
DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL JAYA TAHUN 2025
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase Pengelolaan Kepegawaian, Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan yang Tepat waktu	3 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Meningkatnya Laporan yang Tepat waktu	4 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	5 Laporan	100%
7	01	01	2.02		Administrasi Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu								
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran dalam Pelaksanaan Aktifitas Perkantoran								
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Alat Rumah Tangga, Belanja Peralatan Kebersihan	4 Jenis 75 m 20 Jenis	6 Set	4 Jenis 75 m 20 Jenis	4 Jenis 75 m 20 Jenis	100%	4 Jenis 75 m 20 Jenis	4 Jenis 75 m 20 Jenis	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor	50 Jenis	46 Jenis	46 Jenis	46 Jenis	100%	46 Jenis	46 Jenis	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Cetak	3 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Buku/Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	3 Jenis	100%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja Makan Minum Jamuan Tamu	1200 nasi kotak 600 prasmanan 1200 snack 100 parcel buah	-	1200 nasi kotak 600 prasmanan 1200 snack 3600 nasi kotak	1200 nasi kotak 600 prasmanan 1200 snack 3600 nasi kotak	100%	1200 nasi kotak 600 prasmanan 1200 snack 3600 nasi kotak	1200 nasi kotak 600 prasmanan 1200 snack 3600 nasi kotak	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kooedinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Rapat Koordinasi dalam Daerah, Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Makan Minum Rapat, Makan Minum Rapat	300 OH 36 OH 390 snack 1180 nasi kotak	-	300 OH 36 OH 390 snack 1180 nasi kotak	300 OH 36 OH 390 snack 1180 nasi kotak	100%	300 OH 36 OH 390 snack 1180 nasi kotak	300 OH 36 OH 390 snack 1180 nasi kotak	100%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terciptanya Kelancaran dalam Aktifitas Perkantoran								
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Belanja Meubeler Kantor	7 Jenis	-	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Derah	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Kantor								
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bayar Air, Internet, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	9 Orang	9 Orang	9 Orang	9 Orang	100%	9 Orang	9 Orang	100%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah untuk Kelancaran Aktifitas Perkantoran								
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Bayar Pajak Kendaraan Dinas/Operasional, Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Kegiatan 1 Gedung	1 Kegiatan 1 Gedung	1 Kegiatan 1 Gedung	1 Kegiatan 1 Gedung	100%	1 Kegiatan 1 Gedung	1 Kegiatan 1 Gedung	100%

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat kecamatan	Belanja Fasilitas Kegiatan Kabupaten, Belanja Kunker/Inspeksi Kepala/Wakil Daerah								
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Kegiatan 5 Kali	-	6 Kegiatan 5 Kali	6 Kegiatan 5 Kali	100%	6 Kegiatan 5 Kali	6 Kegiatan 5 Kali	100%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Belanja Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu								
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Fasilitasi Penegakan Perda								
7	01	04	2.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Penegakan Perda di Kecamatan	UN							
7	01	04	2.01	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/Kepolisian Negara RI	Fasilitasi Penegakan Perda	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terciptanya Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional								
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang dibina								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi								

7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Jumlah Desa yang dibina	-	-	-	-	-	16 Desa	16 Desa	100%
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Jumlah Desa yang dibina	-	-	-	-	-	16 Desa	16 Desa	100%

Peninggalan , 2025



YUDI SUHENDRA,S.E.,M.Si
Pembina
NIP.19830628 200212 1 004

Kecamatan Tungkal Jaya melaksanakan 2 indikator kinerja yang menjadi tujuan utama pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tungkal Jaya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU) dan Pembinaan Desa yang tertib Administrasi.

Sistem yang digunakan dalam penilaian indikator Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat yang mengakses pelayanan umum di Kantor Camat Tungkal Jaya. Penilaian dengan system kuesioner dilakukan setiap 1 (Satu) Semester dalam satu tahun, kemudian direkap untuk dijadikan laporan Kepuasan Masyarakat yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan dalam rangka melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan indicator kinerja utama yang selanjutnya adalah Persentase Aparatur Desa yang dibina tertib administrasi dengan target kinerja sebesar 98% telah mencapai target dari yang semula ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian indicator ini tidak lain dikarenakan komitmen Kantor Camat Tungkal Jaya yang terus berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama aparatur perangkat desanya dengan memberikan pengarahan dalam melaksanakan keuangan desa.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-		
				2024		2025
				TARGET	REALISASI	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	86,62%	85%
			Persentase Pemerintah Desa / Kelurahan Yang Dibina Tertib Administrasi	98%	100%	98%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tungkal Jaya

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Kepada Camat. Dengan begitu Kecamatan Sanga Desa dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD-OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tungkal Jaya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Pemerintahan desa/Kelurahan yang dibina
3. Tingkat pemenuhan administrasi pemerintahan
4. Persentase SDM yang berkinerja baik
5. Persentase Pelayanan SPH/APH tepat waktu
6. Persentase Rekomendasi Administrasi Kependudukan yang tepat waktu
7. Nilai IKM di Bidang Pemerintahan
8. Persentase Sengketa Lahan yang difasilitasi
9. Persentase Pembinaan kinerja dan keuangan desa
10. Persentase Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

11. Persentase Penyelesaian Masalah Kesejahteraan Sosial
12. Nilai IKM di Bidang Pelayanan Umum
13. Nilai IKM di Bidang ADM Kepegawaian
14. Jumlah Dokumen yang disusun
15. Persentase Penatausahaan BMD yang tertib
16. Nilai SAKIP Kecamatan
17. Persentase Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja yang tepat Waktu

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Tungkal Jaya dapat dilihat Tabel. T-C.30 dibawah ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tungkal Jaya
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 20256(n+1)	
1	2	3	4	6	7	8		10	10	12	12	13
1	Indeks kepuasan masyarakat	-	☐	80%	85%	85,5 %	100%	86,62%	80%	85%	85,5%	
2	Persentase Pemerintahan desa/Kelurahan yang dibina	-	☐	97%	98%	100 %	100%	98%	85%	98%	100%	
3	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	☐	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	
4	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	☐	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	
5	Persentase Penegakan Perda	-	☐	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	
6	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	-	☐	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tungkal Jaya

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan Desa/masyarakat, Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak Kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat).

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas Pendukung pelayanan Publik pada Kecamatan
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Tungkal Jaya adalah masalah pelayanan public yaitu masalah internal dan masalah eksternal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan, dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya sebagai berikut:

- 1) Analisis Lingkungan Internal
 - a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Jumlah pegawai yang memadai
- 2) Sebagai SKPD tersendiri memiliki pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
- 3) Uraian tugas yang jelas
- 4) Adanya pedoman dan juknis
- 5) Kesadaran akan tupoksi masing-masing
- 6) Memiliki 10 Desa dan 4 Kelurahan

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kualitas SDM kurang
- 2) Minimnya alokasi anggaran penunjang pelayanan
- 3) Sarana prasarana kantor kurang memadai
- 4) Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun)
- 5) Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat pemerintah desa.

2). Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- 3) Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan Kecamatan;
- 4) Adanya bimtek/diklat/fasilitasi/ sosialisasi peraturan yang diadakan Pemkab dan Pemprov;
- 5) Peran swasta dalam pembangunan daerah;
- 6) Kemajuan teknologi;
- 7) Potensi SDA yang belum tergali.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- 1) Kondisi geografis yang kering dan demografis (luas wilayah) yang begitu luas;
- 2) Perilaku pola pikir masyarakat tidak membangun;
- 3) Masih adanya Keluarga Miskin;
- 4) Sebagai Ibukota Kabupaten sehingga rawan kamtbmas.

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi *agressive* artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Isu-isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dan upaya mencari solusi terbaik, diantaranya :

1. Kurang lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan kurang profesional dan akuntabel;
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan prima Pemerintah Kecamatan;
5. Makin sulitnya biaya hidup masyarakat khususnya masyarakat miskin;
6. Kurangnya peran serta masyarakat untuk membangun desa/kelurahan;
7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Kurang tanggapnya masyarakat akan daerah rawan bencana alam.

Dari isu-isu strategis diatas, maka masalah-masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur berbasis IT
3. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Pelayanan prima Pemerintah Kecamatan
5. Perhatian Pemerintah terhadap masyarakat miskin
6. Peranserta masyarakat untuk membangun desa/kelurahan
7. Pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundang-Undangan
8. Ketanggapan daerah rawan bencana alam
9. Ketanggapan daerah rawan Kebakaran Lahan dan Hutan

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Pemerintah Kecamatan Sanga Desa saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya yaitu :

1. Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Terjaminnya sarana dan prasarana aparatur berbasis IT
3. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan profesional dan akuntabel
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan prima Pemerintah Kecamatan
5. Meringankan beban hidup masyarakat
6. Mengikutsertakan masyarakat untuk membangun desa/kelurahan dengan skala prioritas

7. Menuju Masyarakat yang aman, nyaman tertib dan damai
8. Mengantisipasi terjadinya korban jiwa akibat bencana alam

Dari analisis kondisi lingkungan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya pula dapat menentukan proyeksi kedepan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya agar tercapainya tujuan pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya yaitu :

1. Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya aparatur yang akuntabel profesional, dan bermotivasi tinggi.
3. Mewujudkan Pelayanan Prima untuk Masyarakat Kecamatan Sanga Desa.
4. Terwujudnya Usaha Kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan yang kuat.
5. Terwujudnya fasilitas infrastruktur dengan kuantitas dan berkualitas yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Tungkal Jaya
6. Terwujudnya Kecamatan Tungkal Jaya yang aman, nyaman, tertib dan damai.
7. Tanggap dalam menghadapi konflik masyarakat dan bencana alam.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Dalam Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel. 4. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal Renja, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Dan belum ada program yang di hapus atau di kurangkan, untuk disebabkan Pagu Induk yang diberikan telah sesuai dengan rencana Kecamatan Tungkal Jaya

Tabel tc-31

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2025 Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan
Tungkal Jaya**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kantor Camat Tungkal Jaya	Persentase Layanan Perkantoran	100%	4.684.002.562,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kantor Camat Tungkal Jaya	Persentase Layanan Perkantoran	100%	4.849.415.056,00	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.459.047,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.459.047,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Renstra, Renja dan Tapkin	5 Dokumen	19.704.375,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Renstra, Renjadan Tapkin	5 Dokumen	1.547.750,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10.797.550,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	1.947.297,00	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sangat tepat	100%	2.467.078.162,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sangat tepat	100%	3.289.868.162,00	

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.467.078.162,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3.289.868.162,00	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	100%	34.900.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	100%	34.900.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Camat Tungkal Jaya	Jumlah Pegawai yang Mengikuti	2 Orang	14.670.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Camat Tungkal Jaya	Jumlah Pegawai yang Mengikuti	0	14.670.000,00	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Tungkal Jaya	Jumlah Pegawai	15 orang	20.230.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Tungkal Jaya	Jumlah Pegawai yang Mengikuti	0	20.230.000,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Persenatase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	381.373.665,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Persenatase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	314.469.487,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kantor Camat Tungkal Jaya	Terpenuhinya Sarana Listrik dan Peralatan Listrik yang Dibutuhkan Kecamatan	100%	9.925.065,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kantor Camat Tungkal Jaya	Terpenuhinya Sarana Listrik dan Peralatan Listrik yang Dibutuhkan Kecamatan	100%	9.925.065,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Tungkal Jaya	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan	100%	88.220.927,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Tungkal Jaya	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan	100%	88.220.927,00	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya kebutuhan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih kantor Kecamatan	100%	17.992.545,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya kebutuhan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih kantor Kecamatan	100%	17.992.545,00	
4	Penyediaan Barang Logistik kantor	Kantor Camat Tungkal Jaya	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kecamatan	100%	37.768.328,00	Penyediaan Barang Logistik kantor	Kantor Camat Tungkal Jaya	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kecamatan	100%	24.875.678,00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Tungkal Jaya	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Kecamatan	100%	28.592.800,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Tungkal Jaya	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Kecamatan	100%	14.292.272,00	

7	Penyediaan Bahan/Material	Kantor Camat Tungkal Jaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	100%	25.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu	100%	0	
8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu	100%	50.000.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu	100%	60.750.000,00	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Tungkal Jaya	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	100%	123.874.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Tungkal Jaya	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	100%	123.413.000,00	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	43.565.960,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	43.565.960,00	
1	Pengadaan Mebel	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Kebutuhan Mebeluer Kantor	10 Unit	43.565.960,00	Pengadaan Mebel	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Kebutuhan Mebeluer Kantor	10 Unit	43.565.960,00	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100%	271.830.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Tungkal Jaya	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100%	252.566.400,00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Tungkal Jaya	Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Air, Listrik, Telephone, dan Internet Kecamatan.	100%	113.916.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Tungkal Jaya	Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Air, Listrik, Telephone, dan Internet Kecamatan.	100%	116.652.000,00	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak	100%	157.914.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Tungkal Jaya	Tersedianya Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak	100%	135.914.400,00	

7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Tungal Jaya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	880.550.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Tungal Jaya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	880.550.000,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Kantor Camat Tungal Jaya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Terpenuhi Bayar Pajak Kendaraan Dinas Kecamatan	100%	78.840.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Kantor Camat Tungal Jaya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Terpenuhi Bayar Pajak Kendaraan Dinas Kecamatan	100%	78.840.000,00	
2.	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Tungal Jaya	Terpeliharanya Gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	800.000.000,00	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Tungal Jaya	Terpeliharanya Gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	800.000.000,00	
3	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Tungal Jaya	Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	6.710.000,00	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Tungal Jaya	Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	6.710.000,00	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Tungal Jaya	Pelayanan PATEN Fasilitas Kegiatan Kabupaten di Kecamatan, Hubungan Kerja Kepala/Wakil Kepala Daerah	100%	452.611.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Tungal Jaya	Pelayanan PATEN Fasilitas Kegiatan Kabupaten di Kecamatan, Hubungan Kerja Kepala/Wakil Kepala Daerah	100%	335.226.000	
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Tungal Jaya	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	428.236.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Tungal Jaya	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	333.076.000	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kantor Camat Tungal Jaya	Fasilitasi Pendukung Kegiatan Kabupaten di Kecamatan Tungal Jaya, Fasilitas Kunker Kepala/Wakil Kepala Daerah	100%	428.236.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kantor Camat Tungal Jaya	Fasilitasi Pendukung Kegiatan Kabupaten di Kecamatan Tungal Jaya, Fasilitas Kunker Kepala/Wakil Kepala Daerah	100%	333.076.000	
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Kantor Camat Tungal Jaya	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100%	5.000.000,-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kantor Camat Tungal Jaya	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100%	2.150.000,00	

1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kantor Camat Tungal Jaya	Terselenggaranya Pelayanan PATEN	12 Bulan	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Tungal Jaya	Terselenggaranya Pelayanan PATEN	12 Bulan	2.150.000	
3.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Kantor CamatTungal Jaya	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100%	19.375.000,-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kantor CamatTungal Jaya	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100%	0	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Eilayah Kecamatan	Kantor CamatTungal Jaya	Terselenggaranya Pelayanan PATEN	12 Bulan	19.375.000,-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor CamatTungal Jaya	Terselenggaranya Pelayanan PATEN	12 Bulan	0	
III	Program Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Kantor CamatTungal Jaya	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 Kegiatan	23.820.000	Program Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Kantor CamatTungal Jaya	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 Kegiatan	0	
1.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah	Kantor CamatTungal Jaya	Terselenggaranya Penegakan PeraturanDaerah	3 Kegiatan	23.820.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah	Kantor CamatTungal Jaya	Terselenggaranya Penegakan PeraturanDaerah	3 Kegiatan	0	
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan/Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor CamatTungal Jaya	Fasilitasi Penegakan Perda	3 Kegiatan	23.820.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas danFungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan/Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor CamatTungal Jaya	Fasilitasi Penegakan Perda	3 Kegiatan	0	
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kantor CamatTungal Jaya	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	23.820.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kantor CamatTungal Jaya	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	0	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor CamatTungal Jaya	Penyelenggaraan Forkompinda Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	23.820.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor CamatTungal Jaya	Penyelenggaraan Forkompinda Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0	
1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor CamatTungal Jaya	Terselenggarannya Pembinaan Kerukunan UmatBeragama, Ras, dan Golongan Lainnya	2 Kegiatan	23.820.000	Pembinaan Kerukunan Antar Sukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor CamatTungal Jaya	Terselenggarannya Pembinaan Kerukunan UmatBeragama, Ras, dan Golongan Lainnya	2 Kegiatan	0	
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Tungal Jaya	Persentase Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi	90%	44.240.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Tungal Jaya	Persentase Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi	90%	44.240.000	

1.	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Tungkal Jaya	Penyelenggaraan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90%	44.240.000	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Tungkal Jaya	Penyelenggaraan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90%	44.240.000	
----	--	---------------------------	--	-----	------------	--	---------------------------	--	-----	------------	--

1	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kantor Camat Tungal Jaya	Persentase Fasilitasi Batas Desa/Wilayah	90%	12.450.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kantor Camat Tungal Jaya	Persentase Fasilitasi Batas Desa/Wilayah	90%	12.450.000,00	
2	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Camat Tungal Jaya	Persentase Jumlah Desa yang di Bina	90%	31.700.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Camat Tungal Jaya	Persentase Jumlah Desa yang di Bina	90%	31.700.000,00	
Total					4.451.435.056,00	Total					5.301.961.056,00

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tungkal Jaya pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya.
- Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
- Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Tabel T.C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin**

SKPD : Kecamatan Tungkal Jaya

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tungkal Jaya dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan,

- rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan,
- dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Tungkal Jaya

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Tungkal Jaya mempunyai *tujuan* : Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Kecamatan dan Meningkatnya kinerja aparatur di tingkat Kecamatan dengan *sasaran* *Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, Meningkatnya pelayanan distribusi beras untuk Keluarga miskin yang tepat sasaran, Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur di Tingkat Kecamatan, Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Aparatur, dan Meningkatnya kualitas Aparatur.* Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelolah Pemerintahan yang baik

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya adalah:

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70%	70%	80%	85%	85%
			Persentase Pemerintah Desa / Kelurahan Yang Dibina Tertib Administrasi	95%	95%	97%	98%	98%

3.3. Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Tungkal Jaya merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Sanga Desa sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin telah Menyusun rencana Program dan Kegiatan, dngan rincian 3 (Tiga) Program, dan 9 (Sembilan) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Dearah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Meliputi Kegiatan :

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Meliputi Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

**5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa,
Meliputi Kegiatan :**

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Tabel TC.33

**RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	5		6				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		100 %	4.849.415.056				3.360.559.705
						Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	100 %					
						Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	100 %					
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %					
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan tepat waktu	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	100 %	3.495.047				29.757.000

7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Tungkai Jaya, Semua Kelurahan	5 Dokumen	1.547.750	APBD-P		5 Dokumen	14.878.500
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Tungkai Jaya, Semua Kelurahan	4 Laporan	1.947.297	APBD-P		10 Laporan	14.878.500
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Kab. Musi Banyuasin, Tungkai Jaya, Semua Kelurahan	100 %	3.289.868.162				2.257.313.705
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	17 Orang	3.289.868.162	APBD-P		17 Orang	2.257.313.705
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Tungkai Jaya, Semua Kelurahan	100 %	34.900.000				36.555.000

7	1	1	2.05	9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	1 Paket	14.670.000	APBD-P		50 Paket	14.430.000
7	1	1	2,1	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	1 Orang	20.230.000	APBD-P		2 Orang	22.125.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Adminstrasi Umum Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	100 %	339.469.487				453.444.494
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	1 Paket	9.925.065	APBD-P		10 Paket	9.984.927
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	1 Paket	88.220.927	APBD-P		5 Paket	71.433.453
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	17.992.545	APBD-P		15 Paket	21.049.041
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	1 Paket	24.875.678	APBD-P		46 Paket	48.822.462
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	5 Paket	14.292.272	APBD-P		6 Paket	27.750.000

7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	1 Paket	0	APBD-P		12 Laporan	27.750.000
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	12 Laporan	60.750.000	APBD-P		12 Laporan	59.320.011
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	20 Laporan	123.413.000	APBD-P		20 Laporan	180.587.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	43.565.960				52.325.406

7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	1 Paket	43.565.960	APBD-P		1 paket	52.325.406
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	252.566.400				251.316.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	12 Laporan	116.652.000	APBD-P		36 Laporan	90.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	12 Laporan	135.914.400	APBD-P		16 Laporan	250.000.000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	885.550.000				279.848.100
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	2 Unit	78.840.000			3 Unit	77.400.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	1 Unit	800.000.000	APBD-P		3 Unit	195.000.000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	11 Unit	6.710.000	APBD-P		2 Unit	7.448.100
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua	100 %	335.226.000				459.000.000

							Kelurahan						
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	100 %	360.170.000				459.000.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	10 Dokumen	360.170.000	APBD-P		12 Dokumen	459.000.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100 %	17.405.000				26.000.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	12 Laporan	17.405.000	APBD-P		1 Laporan	26.000.000

7	1	4	2.02	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Camat	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Camat	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	9 Kegiatan	2.150.000				5.000.000.000
7	1	4	2.02	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	100 %	2.150.000	APBD-P		3 Laporan	5.000.000.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	0				45.000.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Penegakan Perda di Kecamatan Tungkal Jaya	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	0				45.000.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Fasilitasi Penegakan PERDA	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	100 %	0	APBD-P		3 Laporan	45.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitasi Penegakan Perda	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	100 %	0				50.000.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terciptanya Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	0				50.000.000

7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	75 Orang	0	APBD-P		15 Orang	50.000.000
7	1	6	2.01		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	100 %	44.240.000				110.000.000
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	100 %	44.240.000				110.000.000
7	1	6	2.01	17	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	5 Laporan	12.540.000	APBD-P		1 Dokumen	50.000.000
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kelurahan	5 Laporan	31.700.000	APBD-P		12 Laporan	60.000.000
									5.228.881.056				9.050.559.705

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran induk sebesar Rp. 4.104.002.562,- dan setelah perubahan sebesar Rp.4.849.415.056,- meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran Rp. 19.704.375,- dan setelah perubahan Sebesar Rp. 3.495.047,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp.10.797.550,- menjadi Rp. 1.547.750,-
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan Anggaran Sebesar Rp. 8.906.825,- menjadi Rp. 1.947.297,-

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Anggaran Induk Sebesar Rp. 2.467.078.162,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 3.289.868.162,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Anggaran Rp. 2.467.078.162 dan setelah perubahan Rp. 3.289.868.162,-
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Anggaran Rp. 34.900.000 sesudah Rp.34.900.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan Anggaran Rp. 20.230.000,-
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Sebesar Rp. 14.670.000,-
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp.381.373.665,- sesudah Perubahan Menjadi Rp.339.469.487,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Anggaran Sebesar Rp. 9.925.065,-
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Anggaran Sebesar Sebelum Rp.88.220.927,-
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Anggaran Sebesar Rp. 17.992.545,-
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Anggaran Sebesar Rp. 37.768.328,- menjadi Rp. 24.875.678,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Anggaran Sebesar Rp. 28.592.800,- menjadi Rp.14.292.272,-
 - Penyediaan Bahan material, Anggaran Sebesar Rp. 25.000.000,- menjadi Rp. 0 ,-
 - Fasilitas Kunjungan Tamu, Anggaran Sebesar Rp. 50.000.000,- menjadi Rp.60.750.000,-
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Anggaran Sebesar Sebelum Perubahan Rp.123.874.000,- Menjadi Rp.123.413.000,-
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 43.565.960,- Kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Mebel, Anggaran Sebesar Rp. 43.565.960,-
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran Sebesar Sebelum Perubahan Rp.271.830.400,- Sesudah perubahan Rp. 252.566.400,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Anggaran Sebesar Sebelum Rp. 113.916.000,-Menjadi Rp. 116.652.000,-
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Anggaran Sebesar Sebelum Perubahan Rp.157.914.400,- sesudah perubahan Rp.135.914.400,-
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 885.550.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 78.840.000,-
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya sebesar Rp.800.000.000,-
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya sebesar Rp.6.710.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, denganAnggaran Sebesar Sebelum Perubaha Rp. 452.611.000,- setelah perubahan Rp.335.226.000,- meliputi kegiatan berikut :

- a. Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, dengan Anggaran Sebelum Perubahan Sebesar Rp. 428.236.000,- sesudah perubahan Rp.333.076.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, dengan Anggaran Sebesar Rp 428.236.000,- setelah perubahan Rp.333.076.000,-
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan Anggaran Sebesar

Rp. 19.375.000,- menjadi Rp.0,- meliputi Sub Kegiatan berikut :

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan Anggaran Sebesar Rp. 19.375.000,- menjadi Rp 0,-.
- Rp.333.076.000,-
- c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi Rp.2.150.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi Rp 2.150.000,-

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan AnggaranSebesar Rp. 23.820.000,- menjadi Rp. 0,- Meliputi Kegiatan :

- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 23.820.000,- menjadi Rp.0,- Meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Anggaran Sebesar Rp. 23.820.000,- menjadi Rp. 0,-

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan AnggaranSebesar Rp. . 23.820.000,- menjadi Rp. 0,- Meliputi Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 23.820.000,- menjadi Rp. 0,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, dengan Anggaran Sebesar Rp. 23.820.000,- menjadi Rp. 0,-

5. Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan AnggaranSebesar Rp. 79.749.000,- menjadi Rp. 44.420.000,- Meliputi Kegiatan :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Anggaran Sebesar Rp. 79.749.000,- menjadi Rp.44.240.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan Anggaran Sebesar Rp.23.820.000,- menjadi Rp.12.540.000,-
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan Anggaran sebesar Rp 55.929.000,-. Menjadi Rp. 31.700.000,-

BAB V

PENUTUP

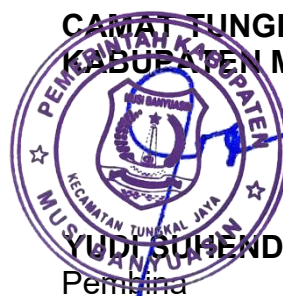
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tungkals Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini merupakan dokumen Kecamatan Tungkals Jaya Tahun 2023-2025, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tungkals Jaya Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Tungkals Jaya.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tungkals Jaya ini juga masih terdapat kurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tungkals Jaya Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu Mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Tungkals Jaya, 2025

**CAMAT TUNGKALS JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si
Pembin
NIP. 19830628 200212 1 004



